

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan bangsa agar dapat meningkatkan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional (Zahari,2017:180).

Pada pembangunan ekonomi ada tiga indikator makro yang dijadikan sebagai ukuran kemajuan pembangunan. Indikator tersebut adalah tingkat pertumbuhan, tingkat penciptaan kesempatan kerja dan kestabilan harga (Gregori,2006:212).

Pertumbuhan ekonomi juga mempunyai dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana PAD idealnya menjadi sumber utama biaya pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan daerahnya. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Hal ini seharusnya membuat pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait pajak ataupun retribusi.

Provinsi Jambi dengan segala potensi sumber daya yang dimiliki dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran atas perkembangan atau kemajuan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu

periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Peningkatan produksi tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan efek yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara atau daerah (Mubaroq dkk, 2013).

Menurut Sukirno (2008:423), bahwa dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produk barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu, untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai. Pertumbuhan ekonomi juga bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan (Sudirman & M. Alhudori, 2018:81).

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya diindikasikan dengan meningkatnya output agregat (produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan. Sehingga, ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah presentase perubahan PDB untuk skala nasional atau presentase perubahan untuk skala provinsi atau kabupaten/kota (BPS, 2014). Pada pembangunan ekonomi, ada tiga indikator makro yang dijadikan sebagai ukuran kemajuan pembangunan. Indikator tersebut adalah tingkat pertumbuhan, tingkat penciptaan kesempatan kerja dan kestabilan harga (Mankiw .N. Gregory, 2006:212). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara (M. Zahari MS, 2012:28)

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu alat untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah baik secara Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pertumbuhan ekonomi dicerminkan dari adanya perubahan PDRB dari satu periode ke periode berikutnya, yang merupakan salah satu petunjuk nyata pembangunan suatu daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan daerah.

Berikut ini tabel 1.1 laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2009-2023.

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2009-2023**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	6,39	-
2010	7,35	15,0
2011	7,86	6,9
2012	7,03	(10,5)
2013	6,84	(2,7)
2014	7,36	7,6
2015	4,21	(42,8)
2016	4,37	3,8
2017	4,6	5,2
2018	4,69	1,9
2019	4,35	(7,2)
2020	-0,51	(111,7)
2021	3,69	(823,5)
2022	5,13	39,0
2023	4,66	(9,1)
Rata-Rata	5	(66,2)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Keterangan : ( ) = Penurunan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi dari tahun 2009-2023 mengalami fluktuasi, pertumbuhan ekonomi dari tahun 2009 hingga tahun 2023 terus meningkat, dimana pertumbuhan ekonomi yang tertinggi berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 39,02% dan yang terendah berada pada tahun 2021 yaitu sebesar - 823,53%, penurunan yang sangat drastis tersebut terjadi karena adanya covid-19 yang menyebabkan penurunan kinerja para penduduk ekonomi daerah.

Salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah Investasi suatu kegiatan yang sangat penting karena menunjang produksi, sehingga investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan cepat atau lambatnya pembangunan dapat diukur dari investasi (Sari, dkk, 2016).

Pendapat lain mengenai pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi yaitu Teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa semakin besar pendapatan yang ditabung dan diinvestasikan, laju pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat (Todaro & Smith, 2011).

Pentingnya investasi asing bagi negara berkembang yaitu sebagai dasar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penanaman modal asing searah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta berperan penting dalam mobilitas dana (Kuncoro, 2010).

Penanaman modal dalam bentuk investasi memberikan kontribusi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah / swasta dan investasi dari luar negeri. Dengan adanya investasi kapasitas produksi akan meningkat sehingga dapat meningkatkan output yang dihasilkan. Meningkatnya output akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Pangestu (2018) hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif, dimana jika investasi tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat

Komponen data investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai peranan yang sangat penting terkait

fungsi investasi sebagai penggerak perekonomian disuatu wilayah. Investasi swasta diperlukan karena dalam melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan biaya yang cukup besar yang salah satunya diperoleh dari investasi swasta baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Hartono, 2022).

Investasi yang memadai juga akan berdampak positif terhadap kondisi perekonomian, karena dengan adanya investasi yang memadai maka modal akan tersedia, semakin banyak investor yang menanamkan modalnya tentunya akan meningkatkan produksi yang nantinya akan menghasilkan *output* yang tinggi, serta akan menambah pendapatan daerah dari pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Investasi merupakan keputusan mengeluarkan dana pada saat sekarang ini untuk membeli aktiva riil ataupun aktiva keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dimasa yang akan datang. Pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat (Sadono Sukirno, 2006).

Berikut ini tabel 1.2 perkembangan realisasi investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jambi Tahun 2009-2023.

**Tabel 1. 2**  
**Perkembangan PMDN dan PMA Provinsi Jambi Tahun 2009-2023**

Tahun	PMDN (Juta Rupiah)	Perkembangan PMDN (%)	PMA (Juta Rupiah)	Perkembangan PMA (%)
2009	9.478.927,6		1.798.579,2	
2010	9.611.608,1	1,39	2.005.272,4	11,49
2011	14.433.096,2	50,16	4.464.023,8	122,61
2012	19.933.675,8	38,11	7.450.686,7	66,90
2013	25.170.266,5	26,27	9.155.386,3	22,87
2014	28.418.185,1	(2,19)	11.525.838,6	25,89
2015	31.996.708,9	12,59	14.889.838,4	29,18
2016	35.881.108,9	12,13	16.901.285,5	13,50
2017	42.606.848,0	18,74	10.264.042,8	(39,27)
2018	31.282.257,5	(31,56)	13.745.008,0	33,91
2019	44.373.800,0	41,48	8.185.560,0	(40,44)
2020	41.350.000,0	(6,81)	5.124.432,0	(37,39)
2021	48.734.000,0	17,85	5.459.700,0	6,54
2022	88.826.592,0	82,26	3.920.260,0	28,19
2023	104.049.894,0	1,71	6.671.970,0	70,19
Rata-rata	38.409.797,9	17,60	8.554.521,7	21,98

*Sumber: BPS Provinsi Jambi 2024*

*Keterangan : ( ) = Penurunan*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya di provinsi Jambi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami perkembangan yang berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 17,60% dan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami perkembangan yang berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 21,98%. Dengan terus mengalami peningkatan, yang artinya investor memiliki pandangan prospek yang baik terhadap keadaan investasi di provinsi Jambi hingga banyak investor yang tertarik untuk melakukan penanaman modal atau berinvestasi di provinsi Jambi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana PAD idealnya menjadi sumber utama biaya pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan daerahnya. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan

mendapatkan kenaikan PAD. Hal ini seharusnya membuat pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait pajak ataupun retribusi.

Definisi pendapatan asli daerah berdasarkan pada UU RI No. 28 Tahun 2009 terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut (Gheta, 2020: 105) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari dalam wilayahnya itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Suhendra, dkk 2022: 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan setiap daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pemerintahan.

Daerah yang memiliki perekonomian yang baik akan memiliki PAD yang tinggi. Dengan Demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik kondisi perekonomian suatu daerah akan menunjang terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perekonomian daerah berpengaruh secara positif terhadap PAD.



Dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan penerimaan daerah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari Pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (local discretion). Langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil dimiliki daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional. Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal daerah pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Upaya peningkatan PAD seharusnya dilihat dari perpektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi juga dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Upaya peningkatan PAD tanpa memperhatikan faktor faktor yang mempengaruhinya akan menimbulkan masalah dalam hal kelancaran ekonomi dan perdagangan, bahkan mungkin akan menghambat perkembangan sektor ekonomi tertentu. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah:

- a. Perbaikan dan penyempurnaan struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas dibidang pendapatan daerah baik ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten atau kota.

- b. Diusahakan pelaksanaan pemungutan atas kendaraan bermotor dilaksanakan dalam satu tahap.
- c. Penetapan besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah menyangkut penentuan nilai jual pajak yang dapat dikaitkan dengan peta pengembangan sehingga dapat diperkecil kemungkinan penetapan pajak yang lebih rendah.

Berikut ini tabel 1.3 perkembangan PAD di Provinsi Jambi Tahun 2009-2023.

**Tabel 1. 3**  
**Perkembangan PAD Provinsi Jambi Tahun 2009-2023**

Tahun	PAD (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	526.523,5	-
2010	686.629,3	30,41
2011	984.232,5	43,34
2012	996.144,8	1,21
2013	1.063.879,9	6,80
2014	1.281.239,4	20,44
2015	1.241.223,0	(3,12)
2016	1.257.258,4	(15,21)
2017	1.580.304,8	50,16
2018	1.657.078,0	4,85
2019	1.651.689,9	(0,33)
2020	1.535.183,4	(7,05)
2021	1.843.431,1	20,19
2022	2.163.585,9	17,26
2023	2.259.688,7	4,44
Rata-Rata	1.368.330,97	12,385

*Sumber: BPS Provinsi Jambi 2024*

*Keterangan : ( ) = Penurunan*

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya, perkembangan pendapatan asli daerah yang paling tinggi terdapat pada tahun 2017 dengan jumlah presentase sebesar 50,16% dan terjadi penurunan pada tahun 2016 dengan jumlah presentase sebesar (15,21)%.

Dengan adanya penerimaan dari pendapatan asli daerah maka bisa membantu membiayai pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi yang dimana bertujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyat dari membangun infrastuktur, sarana dan prasarana. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi mendorong pembangunan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik membahas penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Jambi 2009-2023”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009-2023 mengalami fluktuasi cenderung meningkat, terkecuali pada tahun 2020 sangat menurun drastis karena adanya virus covid-19.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami perkembangan yang berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 17,60%. Perkembangan yang paling pesat terjadi pada tahun 2022 dengan presentase perkembangan

82,26%. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

3. Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami perkembangan yang berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 21,98%. Perkembangan yang paling pesat terjadi pada tahun 2011 dengan presentase perkembangan %. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya, pendapatan asli daerah yang paling tinggi terdapat pada tahun 2017 dengan jumlah presentase sebesar 50,16% dan terjadi penurunan pada tahun 2016 dengan jumlah presentase sebesar (15,21)%.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jambi 2009-2023?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jambi 2009-2023?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jambi 2009-2023?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jambi 2009-2023?

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat akademis maupun praktisi diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pengeluaran pemerintah dan investasi, terutama terkait dengan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jambi 2009-2023?

Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam penelitian yang lebih baik dimasa depan mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktik

- a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini akan menambah kekayaan informasi masyarakat dalam bidang ekonomi pembangunan dan cabang-cabang ekonomi lainnya. salah satu cara konkrit dimana penelitian dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan bukti empiris tentang unsur-unsur yang berkontribusi terhadap peningkatan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini akan membantu menjelaskan unsur-unsur yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga anda dapat menentukan variabel-variabel lainnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

